



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. berdasarkan evaluasi pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD bagi setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa bagi Setiap Desa Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

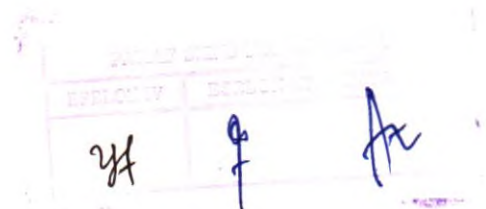
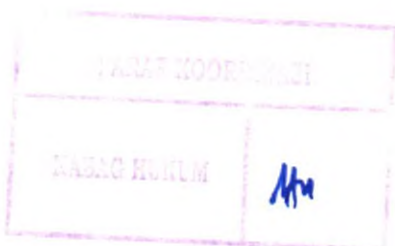
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

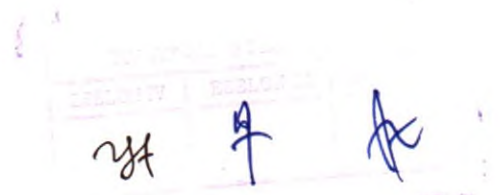
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF KEPALA POKOK BIDANG		
KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III
		

- sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sevagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);



8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);



15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
20. Peraturan Menteri Keuangan 199/PMK.07/2017 tentang Pengalokasian Dana Nomor Tata Cara Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1884);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 8);
27. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 13);
28. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

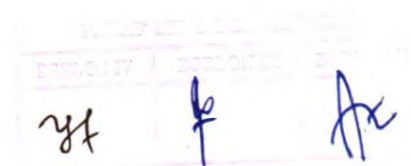
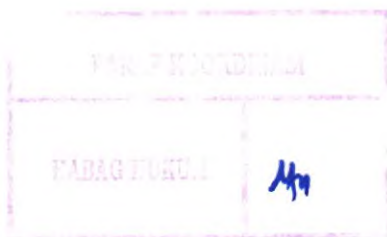
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penganggaran bantuan keuangan ADD kepada Pemerintah Desa pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 97.641.153.300 (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah).



2. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

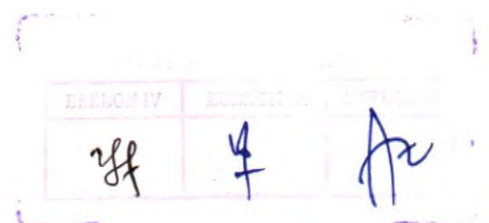
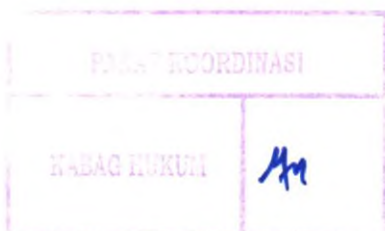
Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa sebelum perubahan;
 - b. Tahap II paling cepat bulan April sebesar 40% (empat puluh persen) Alokasi Dana Desa sebelum perubahan; dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu keempat bulan November sebesar selisih antara Jumlah Pagu Alokasi Dana Desa dikurang jumlah Alokasi Dana Desa Tahap I di tambah dengan Alokasi Dana Desa Tahap II.
- (2) Penyaluran ADD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dana perimbangan ditransfer dari RKUN ke RKUD.
- (3) Penyaluran ADD dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari Kepala Desa dan ditujukan kepada Bupati.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD tahap I, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan menyampaikan :
 - a. peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. peraturan Desa tentang APBDesa;
 - d. peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa; dan
 - e. dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana anggaran kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD tahap II, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.
- (3) Penyaluran ADD tahap III, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan sebagai berikut :
 - a. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap II;
 - b. Laporan BUMDesa;
 - c. Fotocopy NPWP BUMDesa;



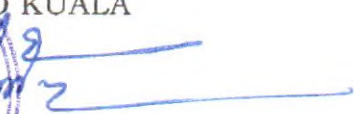
- (4) Penyaluran ADD setiap tahapan sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan dokumen pencairan sebagai berikut :
- a. surat pengantar dari Kepala Desa kepada Camat
 - b. surat permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati;
 - c. kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan (bermaterai);
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (bermaterai);
 - e. pakta integritas (bermaterai); dan
 - f. surat pernyataan penggunaan ADD.

Pasal II

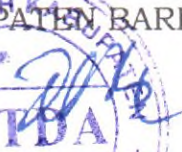
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 24 Juli 2025

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 24 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

SETDA
H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 39

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 39 Tahun 2025
Tanggal 24 Juli 2025

PENETAPAN BESARAN PERUBAHAN ALOKASI DANA DESA
BAGI DESA SE KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD PERUBAHAN	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III PERUBAHAN
				30%	40%	
1	TABUNGANEN	KUALA LUPAK	504.191.700	154.802.100	206.402.800	142.986.800
2	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN BESAR	491.271.700	150.926.100	201.234.800	139.110.800
3	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN KECIL	434.811.700	133.988.100	178.650.800	122.172.800
4	TABUNGANEN	TABUNGANEN MUARA	497.731.700	152.864.100	203.818.800	141.048.800
5	TABUNGANEN	TABUNGANEN TENGAH	497.731.700	152.864.100	203.818.800	141.048.800
6	TABUNGANEN	KARYA BARU	497.731.700	152.864.100	203.818.800	141.048.800
7	TABUNGANEN	TABUNGANEN PEMURUS	618.449.700	189.079.500	252.106.000	177.264.200
8	TABUNGANEN	SUNGAI TERAS DALAM	484.811.700	148.988.100	198.650.800	137.172.800
9	TABUNGANEN	SUNGAI JINGAH BESAR	528.350.700	162.049.800	216.066.400	150.234.500
10	TABUNGANEN	TABUNGANEN KECIL	550.922.700	168.821.400	225.095.200	157.006.100
11	TABUNGANEN	SEI TERAS LUAR	528.350.700	162.049.800	216.066.400	150.234.500
12	TABUNGANEN	SEI TELAN MUARA	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
13	TABUNGANEN	BERINGIN KENCANA	484.811.700	148.988.100	198.650.800	137.172.800
14	TABUNGANEN	TANGGUL REJO	571.763.700	175.073.700	233.431.600	163.258.400
15	TAMBAN	PURWOSARI II	552.382.700	169.259.400	225.679.200	157.444.100
16	TAMBAN	PURWOSARI I	578.956.700	177.231.600	236.308.800	165.416.300
17	TAMBAN	TAMBAN BANGUN	498.464.700	153.084.000	204.112.000	141.268.700
18	TAMBAN	TAMBAN MUARA	565.302.700	173.135.400	230.847.200	161.320.100
19	TAMBAN	TAMBAN KECIL	441.271.700	135.926.100	181.234.800	124.110.800
20	TAMBAN	TINGGIRAN II LUAR	561.989.700	172.141.500	229.522.000	160.326.200
21	TAMBAN	JELAPAT I	618.449.700	189.079.500	252.106.000	177.264.200
22	TAMBAN	TAMBAN MUARA BARU	491.271.700	150.926.100	201.234.800	139.110.800
23	TAMBAN	PURWOSARI BARU	498.464.700	153.084.000	204.112.000	141.268.700
24	TAMBAN	SEKATA BARU	491.271.700	150.926.100	201.234.800	139.110.800
25	TAMBAN	KOANDA	478.350.700	147.049.800	196.066.400	135.234.500
26	TAMBAN	DAMSARI	428.350.700	132.049.800	176.066.400	120.234.500
27	TAMBAN	SIDOREJO	478.350.700	147.049.800	196.066.400	135.234.500
28	TAMBAN	JELAPAT BARU	578.956.700	177.231.600	236.308.800	165.416.300
29	TAMBAN	TAMBAN BANGUN BARU	428.350.700	132.049.800	176.066.400	120.234.500
30	TAMBAN	TAMBAN SARI BARU	421.890.700	130.111.800	173.482.400	118.296.500
31	ANJIR PASAR	ANDAMAN	521.890.700	160.111.800	213.482.400	148.296.500
32	ANJIR PASAR	HILIR MESJID	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
33	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA	607.382.700	185.759.400	247.679.200	173.944.100
34	ANJIR PASAR	BANYIUR	478.350.700	147.049.800	196.066.400	135.234.500
35	ANJIR PASAR	GANDARAYA	465.430.700	143.173.800	190.898.400	131.358.500
36	ANJIR PASAR	GANDARIA	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
37	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA II	566.035.700	173.355.300	231.140.400	161.540.000
38	ANJIR PASAR	ANDAMAN II	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
39	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR II	434.811.700	133.988.100	178.650.800	122.172.800
40	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR I	434.811.700	133.988.100	178.650.800	122.172.800
41	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR LAMA	578.925.850	177.222.345	236.296.460	165.407.045
42	ANJIR PASAR	PANDAN SARI	470.430.700	144.673.800	192.898.400	132.858.500
43	ANJIR PASAR	MENTAREN	465.430.700	143.173.800	190.898.400	131.358.500
44	ANJIR PASAR	BARUNAI BARU	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
45	ANJIR PASAR	DANAU KARYA	465.430.700	143.173.800	190.898.400	131.358.500

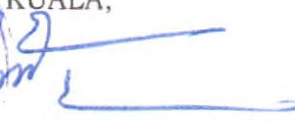
NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD PERUBAHAN	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III PERUBAHAN
				30%	40%	
46	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA	491.271.700	150.926.100	201.234.800	139.110.800
47	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA	622.495.700	190.293.300	253.724.400	178.478.000
48	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
49	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA TENGAH	616.035.700	188.355.300	251.140.400	176.540.000
50	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT LAMA	478.350.700	147.049.800	196.066.400	135.234.500
51	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU	441.271.700	135.926.100	181.234.800	124.110.800
52	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA LAMA	558.842.700	171.197.400	228.263.200	159.382.100
53	ANJIR MUARA	SUNGAI PUNGGU	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
54	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU I	491.271.700	150.926.100	201.234.800	139.110.800
55	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR BARU	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
56	ANJIR MUARA	SEI PUNGGU BARU	478.350.700	147.049.800	196.066.400	135.234.500
57	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA I	511.384.700	156.960.000	209.280.000	145.144.700
58	ANJIR MUARA	SEPAKAT BARSAMA	521.890.700	160.111.800	213.482.400	148.296.500
59	ANJIR MUARA	MARABAHAN BARU	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
60	ANJIR MUARA	BERINGIN JAYA	478.350.700	147.049.800	196.066.400	135.234.500
61	ALALAK	PULAU ALALAK	525.037.700	161.055.900	214.741.200	149.240.600
62	ALALAK	PULAU SEWANGI	554.924.700	170.022.000	226.696.000	158.206.700
63	ALALAK	PULAU SUGARA	504.924.700	155.022.000	206.696.000	143.206.700
64	ALALAK	SUNGAI LUMBAH	578.956.700	177.231.600	236.308.800	165.416.300
65	ALALAK	BERANGAS TIMUR	599.069.700	183.265.500	244.354.000	171.450.200
66	ALALAK	SEI SEMANGAT BHAKTI	428.350.700	132.049.800	176.066.400	120.234.500
67	ALALAK	SUNGAI PITUNG	478.350.700	147.049.800	196.066.400	135.234.500
68	ALALAK	BELANDEAN MUARA	421.890.700	130.111.800	173.482.400	118.296.500
69	ALALAK	BELANDEAN	484.811.700	148.988.100	198.650.800	137.172.800
70	ALALAK	TANJUNG HARAPAN	465.430.700	143.173.800	190.898.400	131.358.500
71	ALALAK	SEMANGAT DALAM	599.069.700	183.265.500	244.354.000	171.450.200
72	ALALAK	BERINGIN	642.609.700	196.327.500	261.770.000	184.512.200
73	ALALAK	SEMANGAT KARYA	478.350.700	147.049.800	196.066.400	135.234.500
74	ALALAK	PANCA KARYA	465.430.700	143.173.800	190.898.400	131.358.500
75	ALALAK	TATAH MESJID	518.577.700	159.117.900	212.157.200	147.302.600
76	MANDASTANA	TERANTANG	492.003.700	151.145.700	201.527.600	139.330.400
77	MANDASTANA	TANIPAH	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
78	MANDASTANA	PUNTIK LUAR	539.811.700	165.488.100	220.650.800	153.672.800
79	MANDASTANA	PUNTIK DALAM	478.350.700	147.049.800	196.066.400	135.234.500
80	MANDASTANA	TABING RIMBAH	577.495.700	176.793.300	235.724.400	164.978.000
81	MANDASTANA	PANTAI HAMBAWANG	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
82	MANDASTANA	TATAH ALAYUNG	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
83	MANDASTANA	PUNTIK TENGAH	552.382.700	169.259.400	225.679.200	157.444.100
84	MANDASTANA	LOKRAWA	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
85	MANDASTANA	SEI RAMANIA	465.430.700	143.173.800	190.898.400	131.358.500
86	MANDASTANA	BANGKIT BARU	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
87	MANDASTANA	ANTASAN SEGERA	465.430.700	143.173.800	190.898.400	131.358.500
88	MANDASTANA	KARANG BUNGA	492.003.700	151.145.700	201.527.600	139.330.400
89	MANDASTANA	KARANG INDAH	545.922.700	167.321.400	223.095.200	155.506.100
90	RANTAU BADAUH	SUNGAI PANTAI	578.956.700	177.231.600	236.308.800	165.416.300
91	RANTAU BADAUH	PINDAHAN BARU	558.842.700	171.197.400	228.263.200	159.382.100
92	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA ASAHI	558.842.700	171.197.400	228.263.200	159.382.100
93	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA	578.956.700	177.231.600	236.308.800	165.416.300
94	RANTAU BADAUH	SUNGAI SAHURAI	434.811.700	133.988.100	178.650.800	122.172.800
95	RANTAU BADAUH	SIMPANG ARJA	415.430.700	128.173.800	170.898.400	116.358.500
96	RANTAU BADAUH	SINAR BARU	483.350.700	148.549.800	198.066.400	136.734.500
97	RANTAU BADAUH	SUNGAI BAMBAN	545.922.700	167.321.400	223.095.200	155.506.100
98	RANTAU BADAUH	DANDA JAYA	586.148.700	179.389.200	239.185.600	167.573.900

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD PERUBAHAN	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III PERUBAHAN
				30%	40%	
99	BELAWANG	MURUNG KERAMAT	415.430.700	128.173.800	170.898.400	116.358.500
100	BELAWANG	SUNGAI SELUANG	470.430.700	144.673.800	192.898.400	132.858.500
101	BELAWANG	BELAWANG	545.922.700	167.321.400	223.095.200	155.506.100
102	BELAWANG	BAMBANGIN	470.430.700	144.673.800	192.898.400	132.858.500
103	BELAWANG	SUKARAMAI	421.890.700	130.111.800	173.482.400	118.296.500
104	BELAWANG	SUNGAI SELUANG PASAR	552.382.700	169.259.400	225.679.200	157.444.100
105	BELAWANG	SAMUDA	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
106	BELAWANG	PARIMATA	421.890.700	130.111.800	173.482.400	118.296.500
107	BELAWANG	KARANG DUKUH	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
108	BELAWANG	PATIH SELERA	484.811.700	148.988.100	198.650.800	137.172.800
109	BELAWANG	KARANG BUAH	465.430.700	143.173.800	190.898.400	131.358.500
110	BELAWANG	BINAAN BARU	421.890.700	130.111.800	173.482.400	118.296.500
111	BELAWANG	RANGGA SURYA	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
112	CERBON	SUNGAI KAMBAT	428.350.700	132.049.800	176.066.400	120.234.500
113	CERBON	SUNGAI RASAU	478.350.700	147.049.800	196.066.400	135.234.500
114	CERBON	SIMPANG NUNGKI	491.271.700	150.926.100	201.234.800	139.110.800
115	CERBON	SAWAHAN	465.430.700	143.173.800	190.898.400	131.358.500
116	CERBON	BANTUIL	516.035.700	158.355.300	211.140.400	146.540.000
117	CERBON	BADANDAN	421.890.700	130.111.800	173.482.400	118.296.500
118	CERBON	SEI TUNJANG	465.430.700	143.173.800	190.898.400	131.358.500
119	CERBON	SEI RAYA	415.430.700	128.173.800	170.898.400	116.358.500
120	BAKUMPAI	BANUA ANYAR	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
121	BAKUMPAI	MURUNG RAYA	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
122	BAKUMPAI	PALINGKAU	478.350.700	147.049.800	196.066.400	135.234.500
123	BAKUMPAI	BALUKUNG	478.350.700	147.049.800	196.066.400	135.234.500
124	BAKUMPAI	BANITAN	484.811.700	148.988.100	198.650.800	137.172.800
125	BAKUMPAI	BATIK	465.430.700	143.173.800	190.898.400	131.358.500
126	BAKUMPAI	BAHALAYUNG	515.430.700	158.173.800	210.898.400	146.358.500
127	BAKUMPAI	SUNGAI SELIRIK	465.430.700	143.173.800	190.898.400	131.358.500
128	KURIPAN	JAMBU BARU	541.271.700	165.926.100	221.234.800	154.110.800
129	KURIPAN	JAMBU	478.350.700	147.049.800	196.066.400	135.234.500
130	KURIPAN	KABUAU	521.890.700	160.111.800	213.482.400	148.296.500
131	KURIPAN	JARENANG	521.890.700	160.111.800	213.482.400	148.296.500
132	KURIPAN	TABATAN	484.811.700	148.988.100	198.650.800	137.172.800
133	KURIPAN	KURIPAN	528.350.700	162.049.800	216.066.400	150.234.500
134	KURIPAN	TABATAN BARU	541.271.700	165.926.100	221.234.800	154.110.800
135	KURIPAN	ASIA BARU	521.890.700	160.111.800	213.482.400	148.296.500
136	KURIPAN	RIMBUN TULANG	528.350.700	162.049.800	216.066.400	150.234.500
137	TABUKAN	PANTANG RAYA	478.350.700	147.049.800	196.066.400	135.234.500
138	TABUKAN	TABUKAN RAYA	545.922.700	167.321.400	223.095.200	155.506.100
139	TABUKAN	TELUK TAMBA	545.922.700	167.321.400	223.095.200	155.506.100
140	TABUKAN	RANTAU BAMBAN	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
141	TABUKAN	TAMBA JAYA	478.350.700	147.049.800	196.066.400	135.234.500
142	TABUKAN	MUARA PULAU	491.271.700	150.926.100	201.234.800	139.110.800
143	TABUKAN	KARYA INDAH	465.430.700	143.173.800	190.898.400	131.358.500
144	TABUKAN	BANDAR KARYA	465.430.700	143.173.800	190.898.400	131.358.500
145	TABUKAN	KARYA MAKMUR	521.890.700	160.111.800	213.482.400	148.296.500
146	TABUKAN	KARYA JADI	595.922.700	182.321.400	243.095.200	170.506.100
147	TABUKAN	PANTANG BARU	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
148	MEKARSARI	MEKARSARI	536.148.700	164.389.200	219.185.600	152.573.900
149	MEKARSARI	TAMBAN RAYA	504.924.700	155.022.000	206.696.000	143.206.700
150	MEKARSARI	TINGGIRAN TENGAH	478.350.700	147.049.800	196.066.400	135.234.500
151	MEKARSARI	TINGGIRAN DARAT	511.384.700	156.960.000	209.280.000	145.144.700

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD PERUBAHAN	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III PERUBAHAN
				30%	40%	
152	MEKARSARI	JELAPAT II	441.271.700	135.926.100	181.234.800	124.110.800
153	MEKARSARI	TAMBAN RAYA BARU	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
154	MEKARSARI	TINGGIRAN BARU	525.037.700	161.055.900	214.741.200	149.240.600
155	MEKARSARI	KARANG MEKAR	478.350.700	147.049.800	196.066.400	135.234.500
156	MEKARSARI	INDAH SARI	465.430.700	143.173.800	190.898.400	131.358.500
157	BARAMBAI	BARAMBAI	552.382.700	169.259.400	225.679.200	157.444.100
158	BARAMBAI	SUNGAI KALI	558.842.700	171.197.400	228.263.200	159.382.100
159	BARAMBAI	PENDALAMAN	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
160	BARAMBAI	HANDIL BARABAI	458.970.700	141.235.800	188.314.400	129.420.500
161	BARAMBAI	BAGAGAP	441.271.700	135.926.100	181.234.800	124.110.800
162	BARAMBAI	BARAMBAI KARYA TANI	415.430.700	128.173.800	170.898.400	116.358.500
163	BARAMBAI	PENDALAMAN BARU	478.350.700	147.049.800	196.066.400	135.234.500
164	BARAMBAI	KARYA BARU	458.970.700	141.235.800	188.314.400	129.420.500
165	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KIRI	571.035.700	174.855.300	233.140.400	163.040.000
166	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KANAN	484.811.700	148.988.100	198.650.800	137.172.800
167	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KIRI DALA	557.382.700	170.759.400	227.679.200	158.944.100
168	MARABAHAN	PENGHULU	539.462.700	165.383.400	220.511.200	153.568.100
169	MARABAHAN	BAGUS	545.922.700	167.321.400	223.095.200	155.506.100
170	MARABAHAN	BALIUK	508.970.700	156.235.800	208.314.400	144.420.500
171	MARABAHAN	ANTAR BARU	421.890.700	130.111.800	173.482.400	118.296.500
172	MARABAHAN	ANTAR JAYA	478.350.700	147.049.800	196.066.400	135.234.500
173	MARABAHAN	ANTAR RAYA	552.382.700	169.259.400	225.679.200	157.444.100
174	MARABAHAN	SIDO MAKMUR	458.970.700	141.235.800	188.314.400	129.420.500
175	MARABAHAN	KARYA MAJU	458.970.700	141.235.800	188.314.400	129.420.500
176	WANARAYA	KOLAM KIRI	495.922.700	152.321.400	203.095.200	140.506.100
177	WANARAYA	ROHAM RAYA	558.842.700	171.197.400	228.263.200	159.382.100
178	WANARAYA	SIMPANG JAYA	595.922.700	182.321.400	243.095.200	170.506.100
179	WANARAYA	TUMIH	465.430.700	143.173.800	190.898.400	131.358.500
180	WANARAYA	PINANG HABANG	595.922.700	182.321.400	243.095.200	170.506.100
181	WANARAYA	WARINGIN KENCANA	515.430.700	158.173.800	210.898.400	146.358.500
182	WANARAYA	BABAT RAYA	515.430.700	158.173.800	210.898.400	146.358.500
183	WANARAYA	KOLAM KANAN	539.462.700	165.383.400	220.511.200	153.568.100
184	WANARAYA	SIDOMULYO	552.382.700	169.259.400	225.679.200	157.444.100
185	WANARAYA	KOLAM MAKMUR	502.382.700	154.259.400	205.679.200	142.444.100
186	WANARAYA	SURYA KANTA	595.922.700	182.321.400	243.095.200	170.506.100
187	WANARAYA	SUMBER RAHAYU	589.462.700	180.383.400	240.511.200	168.568.100
188	WANARAYA	DWIPASARI	465.430.700	143.173.800	190.898.400	131.358.500
189	JEJANGKIT	SAMPURNA	471.911.600	145.118.070	193.490.760	133.302.770
190	JEJANGKIT	JEJANGKIT BARAT	521.890.700	160.111.800	213.482.400	148.296.500
191	JEJANGKIT	BAHANDANG	421.890.700	130.111.800	173.482.400	118.296.500
192	JEJANGKIT	JEJANGKIT TIMUR	497.731.700	152.864.100	203.818.800	141.048.800
193	JEJANGKIT	CAHAYA BARU	471.890.700	145.111.800	193.482.400	133.296.500
194	JEJANGKIT	JEJANGKIT PASAR	478.350.700	147.049.800	196.066.400	135.234.500
195	JEJANGKIT	JEJANGKIT MUARA	478.363.450	147.055.845	196.074.460	135.233.145
JUMLAH			97.641.153.300	29.983.543.260	39.978.057.680	27.679.552.360



 BUPATI BARITO KUALA,



 H. BAHRUL ILMI